

## ANALISIS KEBUTUHAN FASILITAS SOSIAL DAN EKONOMI DI KECAMATAN PONDOK GEDE KOTA BEKASI

Ir. Sutaryo, M. Si<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik  
Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

### Abstrak

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan sentralitas marshall, aksesibilitas, dan standar nasional Indonesia 2004 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Pada dasarnya perkembangan dan pertumbuhan kegiatan di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dengan penduduk yang terus bertambah membutuhkan lahan yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi. Dalam Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi tahun 2010-2030 menyatakan bahwa Kecamatan Pondok Gede dalam Sub Pusat Pelayanan Kota ( SPPK ) Pondok Gede di sekitar Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan. Perkembangan Kecamatan Pondok Gede ditandai dengan peningkatan dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas perdagangan dan jasa.*

**Kata kunci:** Sentralitas, Aksesibilitas, Sub Pusat Pelayanan Kota, Kota Bekasi

### PENDAHULUAN

Dalam struktur tata ruang wilayah makro, Kota Bekasi diarahkan pengembangannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus menjadi bagian dari kawasan pengimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta. Kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri dan permukiman. Sejalan dengan perkembangan waktu wilayah Kota Bekasi telah mengalami peningkatan status yaitu sejak ditetapkan sebagai Kota Administratif meliputi 4 Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981. Kemudian meningkat status Kota Bekasi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi melalui Undang - undang Nomor 9 Tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 10 Maret 1997 dengan pemekaran wilayah administrasi menjadi 8 kecamatan. Kemudian sejak tahun 2001 wilayah administrasi Kota Bekasi dimekarkan menjadi 10 Kecamatan dan 52 Kelurahan.

Sementara pada tahun 2004 administrasi Kota Bekasi dimekarkan kembali mejadi 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan.

Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bekasi tahun 2010 - 2030 bahwa Kecamatan Pondok Gede dalam rencana struktur ruang diarahkan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan. Sedangkan dalam rencana pola ruang diarahkan dengan pengembangan perumahan kepadatan tinggi, peningkatan permukiman kumuh, perlindungan setempat di sempadan sungai Kali Sunter, pengembangan perdagangan dan jasa, pengembangan RTH dan RTnH, pengembangan sarana pendidikan, sarana kesehatan, pengembangan sarana peribadatan, pengembangan sarana pemerintahan,

Dampak dari perubahan status dan pemekaran wilayah dan kebijakan tata ruang Kota Bekasi dan Rencana Detail Tata

Ruang Kecamatan Pondok Gede tersebut, berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Kota Bekasi dan Kecamatan Pondok Gede seperti: perkembangan penduduk, wilayah terbangun, minat investasi (perumahan, jasa dan perdagangan, industri dll), transportasi, terbentuk pola pusat - pusat pelayanan baru, kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi.

Pola pusat - pusat pelayanan di wilayah Kota Bekasi masih terbentuk ke dalam pola primacy atau konsentrasi pada Pusat Kota Bekasi maupun bagian wilayah Kota seperti Pondok Gede dan Bantar Gebang. Disamping pusat pelayanan baru seperti: Jatisampurna, Kranji, Pulau Gebang, Wisma Asri. Primacy merupakan indikator ketersediaan pelayanan termasuk fasilitas - fasilitasnya yang tidak merata dan penyampaian pelayanan sosial dan ekonomi yang tidak efisien.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan penduduk Kota Bekasi pada umumnya dan khususnya Kecamatan Pondok Gede yang semakin pesat yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan dan perkembangan fasilitas sosial dan ekonomi. Berdasarkan Diktat Kuliah Perencanaan Kota Baru PL 485 (Djoko Sujarto, 2002: 72) mengemukakan bahwa:

*Perkembangan kota dipengaruhi dan ditentukan oleh factor tertentu yaitu terkait dengan tata nilai, pola sosial budaya, keadaan sosial, keadaan sosial politik dan letak geografis.*

Terkait dengan faktor pengaruh dan penentu kota tersebut, maka salah satu faktor pengaruh dan penentu bagi Kota Bekasi adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2015 sebesar 2.384.413 jiwa dengan presentase 11,47 % atau 273.454 Jiwa. Menurut *Kamus*

*Tata Ruang* (1997 : 54) bahwa kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa merupakan Kota Metropolitan/ Raya, sehingga Kota Bekasi masuk dalam kategori kota Metropolitan.

Sebagai Kota Metropolitan kendala dan permasalahan utama adalah kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi yang tidak sebandingnya dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik yang semakin pesat dari tahun ke tahun akibat juga pengaruh pengembangan Jabodetabek bahwa koridor Barat - Timur merupakan wilayah pengembangan perkotaan, termasuk Kecamatan Pondok Gede yang berbatasan langsung dengan Wilayah Kotamadya Jakarta Timur (Sutaryo, Abidin, 2015).

Dari hasil pengamatan masalah spesifik terkait dengan fasilitas sosial dan ekonomi adalah kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi masih kurang, distribusi dan penyebaran fasilitas sosial dan ekonomi tidak merata, aksesibilitas fasilitas sosial dan ekonomi masih rendah, minimnya sumber pendanaan yang bersumber APBD II, tingkat pelayanan fasilitas sosial dan ekonomi belum terpenuhi.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu untuk mengolah data yang didapatkan melalui survei primer dan survei sekunder, agar dapat menjawab sasaran penelitian yang ingin dicapai. Adapun metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Sentralitas Marshall
2. Aksesibilitas
3. SNI - 2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Indeks Sentralitas Marshall**

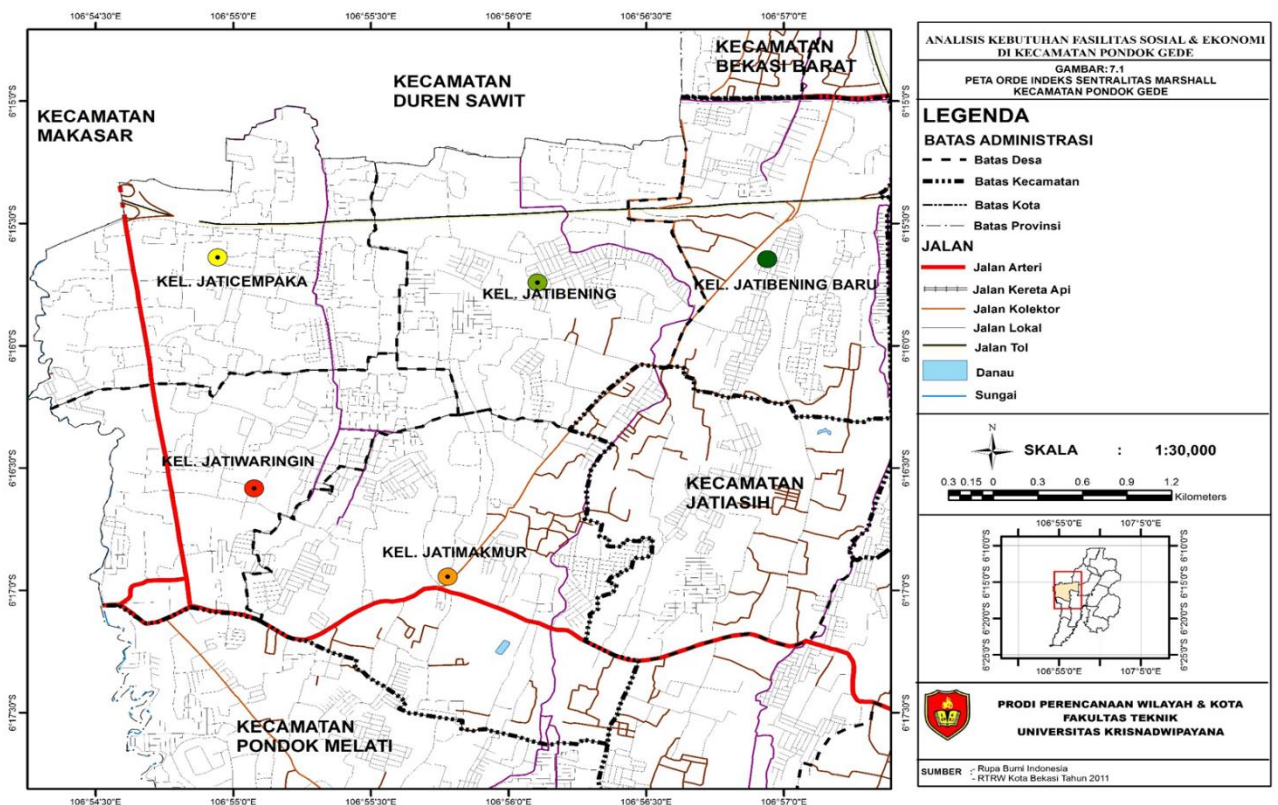
**Tabel 1** Hasil Analisis Indeks Sentralitas Orde Kelurahan di Kecamatan Pondok Gede Tahun 2016

No	Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Fasilitas(Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, dan Ekonomi) (Unit)	Orde
1	Jatimakmur	72.774	607	I
2	Jatiwaringin	51.885	501	I
3	Jatibening	47.490	207	III
4	Jaticempaka	67.016	365	II
5	Jatibening Baru	51.328	220	III
6	Jumlah	290.493	1900	-

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2016

Keterangan:  
 Jumlah Orde =  $1+3,3 \log n$   
 =  $1+3.3 \log 5$   
 = 3.30 (3 Orde)  
 Orde Tertinggi = 607  
 Orde Terendah = 207  
 Range = 400

Interval = 133.33  
 Orde I 473.67-607 Jatimakmur dan Jatiwaringin  
 Orde II 340.34-473.67 Jaticempaka  
 Orde III 207-340.34 Jatibening dan Jatibening Baru



**Gambar 1** Peta Orde Indeks Sentralitas Marshall Kecamatan Pondok Gede Aksesibilitas

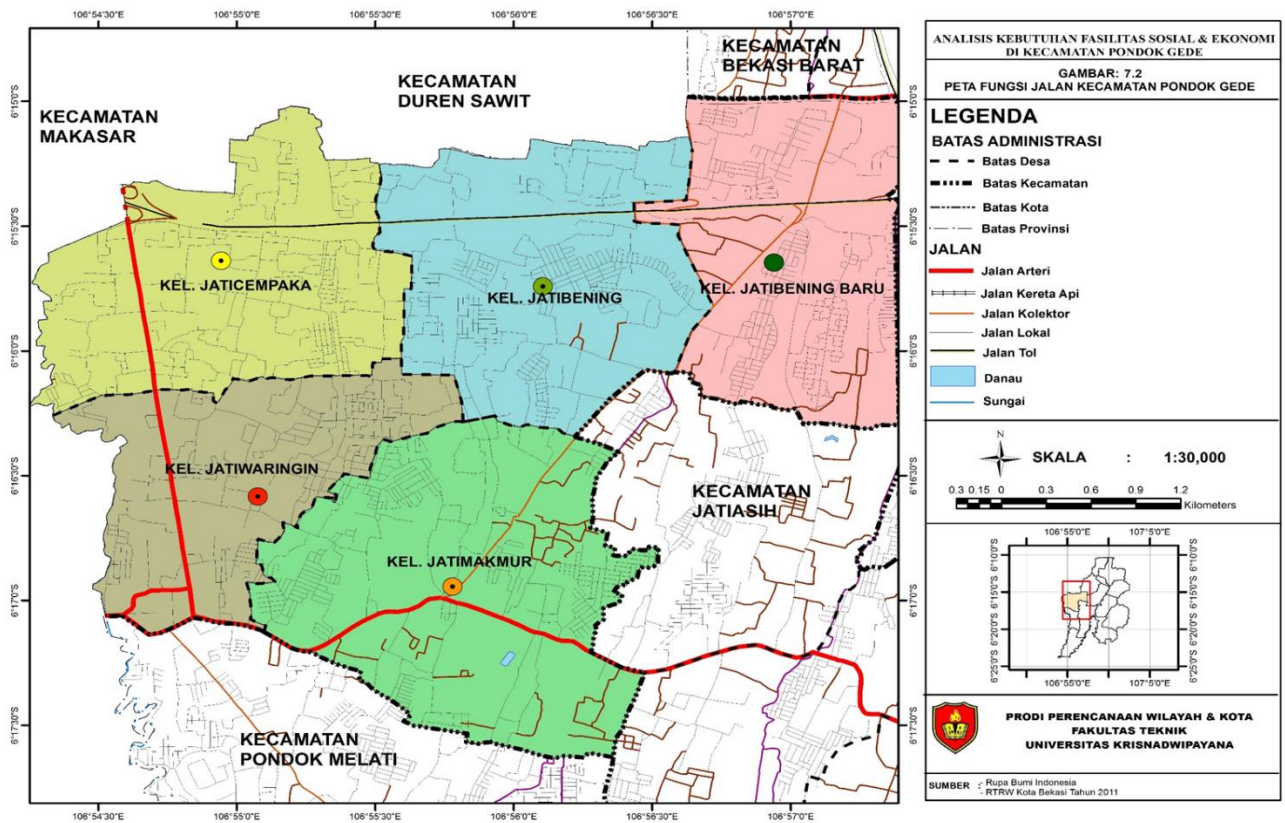
**Tabel 2** Nilai I (Aksesibilitas) di Kecamatan Pondok Gede Tahun 2016

No	Zona	K	F	T	D	I	Rangking
1.	Jatiwaringin	3	2	3	0	18	T
2.	Jatibening	2	1	1	7,1	0,3	R
3.	Jatibening Baru	2	1	1	5,20	0,4	R
4.	Jaticempaka	3	2	3	3,86	4,66	R
5.	Jatimakmur	2	1	1	2,45	0,82	R

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2016

Keterangan :  $I = \frac{K \cdot F \cdot T}{D}$

Klasifikasi = 0,3-6,2 : R, 6,2-12,1 : S, 12,1 - 18 : T



**Gambar 2** Peta Fungsi Jalan Kecamatan Pondok Gede

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Indeks Sentralitas Marshall, dapat diperoleh yang termasuk dalam Orde I yaitu kelurahan Jatimakmur, dan Jatiwaringin, Orde II yaitu kelurahan Jaticempaka, dan Orde III yaitu Kelurahan Jatibening dan Jatibening Baru.

Dengan metode analisis aksesibilitas dari tiap Kelurahan (pusat zona) menuju ke Pusat Kota Pondok Gede bahwa Kelurahan Jatiwaringin memiliki rangking tertinggi, sedang Kelurahan-Kelurahan lainnya memiliki rangking

terendah (Kelurahan Jatibening, Jatibening Baru, Jaticempaka, dan Jatimakmur).

## SARAN

Dalam 5 Tahun kedepan, pada fasilitas ekonomi harus menyiapkan tempat parkir sesuai kebutuhan di setiap pusat-pusat kegiatan ekonomi dan melarang parkir di badan jalan, optimalisasi fasilitas sosial & ekonomi di sepanjang koridor jalan utama Kelurahan Jaticempaka, Jatiwaringin, dan Jatimakmur, membuka rute angkutan umum (koasi dan mikrolet) untuk melayani pusat-pusat pelayanan

lingkungan permukiman di Kecamatan Pondok Gede terutama bagi Kelurahan-Kelurahan yang memiliki aksesibilitas rendah (Kelurahan Jatibeninh, Jatibening Baru, Jaticempaka, dan Jatimakmur), mempertahankan fasilitas yang ada (sebanyak 6 Rumah Sakit) karena masih memenuhi kebutuhan sampai akhir perencanaan, mendorong pengembangan apotek dan praktek dokter di setiap pusat-pusat pemukiman dan juga meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kecamatan Pondok Gede dalam rangka mendukung program pemerintah (BPJS), mendorong pengembangan fasilitas sosial & ekonomi di Kecamatan Pondok Gede kearah vertikal karena lahan terbatas dan mahal, melakukan pengawasan pengendalian dan melakukan penertiban terhadap fasilitas sosial & ekonomi yang belum mematuhi ketentuan GSB, dan mendorong distribusi secara merata fasilitas sosial & ekonomi skala lingkungan pemukiman dengan mengikuti ketentuan persyaratan lokasi, jarak, dan kebutuhan ruang sebagaimana ketentuan Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004.

Dalam 10 tahun kedepan, perlu pengawasan dan pengendalian terhadap laju pertumbuhan dan perkembangan fasilitas sosial dan ekonomi terutama berada pada koridor Jln. Jatiwaringin Raya - Jln. Pondok Gede dan Jln. Jatimakmur - Jln. Kemang Sari Raya - Jln. Caman dan Jln. Dr Ratna., meningkatkan peran integrasi sarana dan prasarana transportasi guna kemudahan aksesibilitas wilayah, optimalisasi pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi di Kecamatan pondok Gede dengan model pengembangan vertikal sesuai dengan aturan yang diamanahkan dalam RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) Kecamatan Pondok Gede, optimalisasi peran pemerintah Kota Bekasi dalam hal penetapan regulasi bagi pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi yang dilaksanakan oleh pihak swasta agar lebih terpantau serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti mengurangi kemacetan lalu lintas, dan

endorong Pemerintah Kota Bekasi, swasta, dan masyarakat dalam pengadaan lahan untuk pengembangan fasilitas sosial & ekonomi yang peruntukannya sesuai dengan pola ruang di Kecamatan Pondok Gede.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)*

Alfiansyah, Talitha Aurellia et al. (2022). *Hubungan antara Karakteristik Sosio-Demografi dan Penggunaan Taman dengan Subjective Well-being Penduduk Kota Surabaya*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Sutaryo, Abidin, 2015. *Analisis Pusat Pelayanan di Kabupaten Belitung Timur Dengan Metode Indeks Sentralitas Marshall & Skalogram*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

Alonso, W. 1964, *Location and Land Use*, Cambridge: Harvard University Press.

Bergel, B. 1955, *Urban Sociology*, 109 New York.

Budhi Tjahjaty, 1990: 42, *Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Kota*, Jakarta.

Burgess. E.W. 1925, *The Growth of The City*, Chicago: University of Chicago Press.

Djoko Sujarto, 1977 : 170 -171, *Pengertian Fasilitas Sosial*, Jakarta.

Doxiadis, 1968, *Permukiman atau Perkotaan Merupakan Totalitas Lingkungan Yang Terbentuk Oleh 5 Unsur*.

Hadi Sabari Yunus, 2002, *Struktur Tata Ruang Kota*, Pustaka Pelajar.

Kevin Lynch, 1960, *The image of the city*.

Sugeng Budiharsono, 2001, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan*

- Lautan, PT. Pradinya Paramita, Jakarta.
- Soefaat, 1999, *Hubungan Fungsional Teknik Sipil dan Tata Ruang Kota Daerah*, Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Susongko, 1986, *Pengantar Perencanaan Kota*, Erlangga.
- Suwardjoko Warpani, 1984, *Analisis Kota dan Daerah*, ITB Bandung.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2016, *Kota Bekasi Dalam Angka*, Pemerintah Kota Bekasi.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2016, *Kecamatan Pondok Gede Dalam Angka*, Pemerintah Kota Bekasi.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2016, *Statistik Daerah Kecamatan Pondok Gede*, Pemerintah Kota Bekasi.
- Departemen Pekerjaan Umum, 1987 : 20 – 21, *Pengertian Fasilitas Pelayanan Sosial*, Jakarta
- Peraturan/Undang- Undang**
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 2016, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2010-2030*, Pemerintah Kota Bekasi.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 2016, *Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pondok Gede 2011-20331*, Pemerintah Kota Bekasi.